



Kabar Pemilu
Nomor 9, September 2009

Impunitas: Noda hitam dalam demokrasi Indonesia

By Carmel Budiardjo

Sejak Suharto merebut kekuasaan di Indonesia pada bulan Oktober 1965, impunitas telah mengakar di negara ini. Meskipun jatuhnya diktator itu pada bulan Mei 1998 kemudian memperkenalkan Indonesia dengan mekanisme dasar demokrasi, tetapi peristiwa itu sama sekali tak berpengaruh untuk mengakhiri momok impunitas.

Pemilu tahun 2009 dengan penuh empati telah mengembalikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kekuasaan dan kini ia memiliki kesempatan lain untuk menambahkan lebih banyak substansi pada transisi demokrasi dengan mengatasi masalah fundamental yang ditimbulkan oleh tiadanya akuntabilitas bagi kejahatan hak asasi manusia yang serius.

Impunitas, yang berarti kejahatan tanpa hukuman, menimbulkan ancaman serius bagi hak asasi manusia. Jika terjadi kejahatan, sesuai dengan kedaulatan hukum maka pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Hal ini jelas tertuang dalam Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 8, yang menyatakan:

'Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.'

Selama enam bulan pertama setelah Suharto berkuasa, diperkirakan bahwa terdapat hingga satu juta orang yang

tewas dalam pembunuhan yang melanda negeri ini. Pembunuhan itu dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Indonesia atau oleh masa yang bertindak karena hasutan militer dan dipersenjatai oleh mereka. Puluhan ribu orang ditangkap di seluruh negeri dan ditahan tanpa pengadilan, banyak diantaranya yang mendekam dalam penjara hingga 14 tahun.

Gelombang pembunuhan dan penangkapan massal diakui sebagai salah satu kejahatan terburuk terhadap kemanusiaan dalam abad ke-20. Pada tahun 1977 Amnesty Internasional menyatakan bahwa 'tak ada negara lain di dunia ini yang memiliki begitu banyak tahanan politik yang masuk penjara tanpa diadili untuk waktu yang sedemikian lama.'

Pada tahun 1969, 13.000 tahanan lelaki dibuang ke Buru, sebuah pulau terpencil yang dikelilingi laut berhiu, tanpa ada jalan untuk melarikan diri. Mereka tak dapat dikunjungi keluarganya yang tinggal sekitar 2.000 kilometer jauhnya di pulau Jawa dan bagian lain di negara ini, dan harus hidup dalam lingkungan fisik yang keras dan menjalani kerja paksa tanpa

ampun. Ratusan tahanan tewas karena kelaparan dan luka yang tak terobati; mereka tak mendapatkan pengobatan medis, bahkan yang paling mendasar sekalipun.

Selama jaman Order Baru di bawah pimpinan Suharto, tak ada lagi hak akan kebebasan berpendapat dan berkumpul, semua orang Indonesia diminta bersumpah untuk setia kepada ideologi negara, Pancasila, dan harus bergabung dengan serikat pekerja, organisasi kewanitaan, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa dan organisasi intelektual yang berada di bawah kendali pemerintah. Semua partai politik dan organisasi masa yang ada sebelum Suharto berkuasa diberangus.

Suharto tak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mengerikan yang terjadi selama ia berkuasa dengan lalim. Usaha untuk secara formal menyeretnya ke pengadilan dengan tuduhan korupsi telah dilakukan, tapi dengan bantuan pengacara yang dibayar mahal, ia berhasil lolos dari keadilan atas dasar bahwa ia terlalu sakit untuk diadili. Sedangkan mengenai kejahatan kemausiaan serta tindakan ilegal yang dilakukannya dalam agresi di Timor Timur, tak ada upaya untuk menuntutnya dan ia pun meninggal pada bulan Januari 2008 tanpa pernah diadili.

Selama masa Orde Baru, banyak kekejian yang dilakukan dan yang paling menonjol adalah kejadian berikut:

Insiden Tanjung Priok, 12 September 1984

Ratusan demonstran yang marah akibat dikotorinya mushola mereka di Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh anggota Babinsa, dibantai tembakan peluru pasukan, yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Investigasi yang dilakukan kemudian memperkirakan bahwa 63 orang demonstran meninggal

dan ratusan lainnya terluka. Tigapuluh enam orang yang selamat, termasuk beberapa yang masih menderita luka, diadili enam bulan kemudian dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Tak ada anggota militer yang dimintai pertanggungjawaban karena pembantaian itu.

Insiden Lampung, Januari 1969

Puluhan warga desa terbunuh di desa Talangsari di Lampung, Sumatra Selatan, ketika pasukan menembaki para demonstran, yang marah akibat meningkatnya tekanan atas penghidupan dan tanah mereka karena para transmigran dari Jawa. *Asiaweek* kemudian melaporkan bahwa 'Talangsari tinggal puing-puing belaka ... hanya gundukan abu dan balok-balok gosong yang tersisa di tempat berpenduduk hampir tiga ratus orang itu.'

Pasukan Kematian Membantai Ribuan Orang, 1983

Selama tahun 1983, pasukan kematian yang terdiri dari anggota militer yang lencananya ditanggalkan menembak mati ribuan orang di kota-kota besar dan kecil di seluruh negara dalam apa yang disebut 'komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban.' Di banyak tempat, mayat bergelimpangan di jalanan. Pembunuhan itu, yang berlangsung selama beberapa bulan, kemudian dikenal sebagai petrus (pembunuhan misterius).

Itu hanyalah satu-satunya kekejaman yang diakui Suharto sebagai tanggung jawabnya. Dalam otobiografinya, ia mengatakan: 'Tak ada yang misterius mengenai itu semua. Apakah benar tidak melakukan apa-apa? (Kekerasan) harus diatasi dengan kekerasan.... Mereka yang mencoba melawan, suka atau tidak suka, harus ditembak. Karena mereka melawan, mereka ditembak.'

Pembunuhan acak itu dianggap sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa

penguasa militer memiliki kekuasaan untuk menembak dan tekad untuk menangani siapa saja yang berani menentang pemerintah.

PEMBUNUHAN POLITIK DI PAPUA BARAT

Papua Barat secara kontroversial menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969 setelah adanya 'Aksi Kebebasan Memilih' yang curang ketika lebih dari 1.000 kepala suku yang ditunjuk secara bulat mendukung integrasi di bawah ancaman angkatan bersenjata Indonesia.

Rakyat Papua Barat sejak itu menderita banyak diskriminasi, tanahnya dirampas, ribuan orang tergusur oleh pendatang dari Indonesia yang jumlahnya terus meningkat dan usaha untuk memprotes pelanggaran hak asasi manusia ditekan kuat. Sejak berada dalam kekuasaan Indonesia, media internasional dan LSM asing tidak mendapatkan akses masuk ke Papua Barat sehingga tak mungkin dapat memantau kondisi di sana dan melakukan investigasi atas insiden-insiden, yang beritanya telah sampai ke luar negeri. Jumlah korban yang tewas akibat tekanan oleh pihak kemananan selama empat dekade terakhir ini diyakini telah mencapai puluhan ribu orang.

Pada bulan April 1984, Arnold Ap, seorang pekerja budaya dan kurator museum yang mendirikan kelompok nyanyi dan tari Membesak dan menjalankan program-program yang populer di radio lokal dibunuh ketika berada dalam tahanan militer, mengakibatkan pukulan hebat bagi aspirasi budaya Papua. *Sydney Morning Herald* berhasil merangkaikan kronologis peristiwa yang mengakibatkan kematiannya, yang mengungkapkan bahwa pasukan Kopassanda, pasukan khusus tentara yang sekarang dikenal sebagai Kopassus, merencanakan apa yang diduga sebagai pelariannya dari

penjara yang membuatnya ditembak dengan darah dingin.

Pada bulan November 2001, Theys Hijo Eluay, ketua Dewan Presidium Papua yang sangat populer, yang didirikan di Jayapura tak lama setelah jatuhnya Suharto, diundang untuk menghadiri acara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan oleh komandan unit Kopassus setempat. Dalam perjalanan pulang, mobilnya diserang dan ia diculik. Pada hari berikutnya, mayatnya ditemukan di dalam mobilnya yang terbalik. Hasil otopsi mengkonfirmasi bahwa ia telah dicekik. Sopirnya, Aristoteles Masoka, menghilang setelah kembali ke pangkalan Kopassus, tampaknya untuk melaporkan penculikan itu, dan sejak itu tak pernah terdengar kabarnya.

Pembunuhan Theys banyak diberitakan, terutama di Australia, dan itu mengakibatkan ditangkapnya tujuh perwira Kopassus yang mengawal pemimpin Papua itu kembali ke rumahnya. Mereka diadili di pengadilan militer dan dituduh bukan dengan pembunuhan tetapi 'penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban'. Diduga mereka terlibat dalam perdebatan dengan korban terkait dengan dukungannya bagi kemerdekaan Papua dan kemudian mencekiknya. Sebagian dihukum tiga tahun penjara dan sebagian lagi dihukum penjara selama tiga setengah tahun. Kemudian, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu, menyebut orang-orang yang dihukum itu sebagai 'pahlawan' yang telah menjalankan tindakan sah dalam membela negara kesatuan Indonesia.

TEROR NEGARA DI ACEH

Aceh, yang terletak di ujung barat laut Sumatra, menderita selama lebih dari dua dekade karena kebrutalan, pembantaian, penculikan dan pemerkosaan dari pertengahan 1970 sampai tsunami yang

menghancurkan pada bulan Desember 2004.

Setelah muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin mendeklarasikan kemerdekaan atas wilayah itu pada tahun 1976, angkatan darat Indonesia berusaha menumpas gerakan yang mendapat dukungan luas dari masyarakat setempat. Pada tahun 1990-an, Aceh digambarkan sebagai zona perang virtual, menyusul masuknya sejumlah besar tentara. Di beberapa daerah, masyarakat dipaksa turut serta dalam operasi "pagar betis" untuk menumpas para gerilyawan.

Tentara diperintah untuk memburu GAM. Pada bulan Februari 1981, komandan militer, Mayor Jenderal H.R Pramono dari Kopassus mengeluarkan perintah bagi warga Aceh untuk membunuh anggota GAM dengan tangan mereka sendiri.

Pada akhir 1990, suatu dokumen dari GAM melaporkan bahwa 56 tahanan yang tengah ditahan di rutan di Lhokseumawe ditelanjangi, ditembak mati dan dilempar ke jurang di mana mereka kemudian ditemukan oleh penduduk desa, sebagian besar tanpa identitas. Menurut laporan Asia Watch, seorang dokter tentara memperkirakan bahwa terdapat ribuan kematian dari ke dua belah pihak, lebih banyak yang tewas karena eksekusi singkat daripada dalam pertempuran fisik. Mayat dengan luka tembak atau tusukan ditemukan sepanjang sungai atau di perkebunan sementara militer tak memperbolehkan mayat dikubur sesuai dengan ajaran Islam.

Menyusul jatuhnya Suharto, aktivis HAM menemukan tiga kuburan masal di satu daerah saja di mana lebih dari 1.400 mayat diyakini telah dikuburkan.

Setelah Suharto tersingkir dari kekuasaan, pemerintah pusat di Jakarta memulai perundingan dengan GAM dengan mediasi mantan presiden

Finlandia. Sementara perundingan masih dalam proses, Aceh dihancurkan oleh tsunami pada bulan Desember 2004. Bencana itu meluluhlantakkan ibu kota, Banda Aceh, dan daerah perkotaan lainnya, dan menyebabkan kematian diperkirakan sejumlah 140.000. Bantuan asing mengucur ke wilayah itu untuk mendanai rekonstruksi. GAM tak lagi menuntut kemerdekaan, dan dengan hancurnya Aceh berkeping-keping, tercapailah kesepakatan perdamaian. Keputusan presiden memberikan amnesi bagi semua tahanan politik Aceh. Tetapi pelanggaran HAM di masa lalu tidak ditangani dengan baik sementara ketentuan bagi pembentukan pengadilan HAM di Aceh masih belum dilaksanakan.

INVASI DAN PENDUDUKAN ATAS TIMOR TIMUR

Pendudukan atas Timor Timur, sekarang disebut Timor Leste, menyusul invasi pada bulan Desember 1975, berakhir hingga 1999. Pembunuhan di wilayah itu luar biasa banyaknya. Dalam invasi yang berlangsung beberapa minggu itu, tokoh keagamaan Timor melaporkan bahwa 60.000 orang telah terbunuh. Investigasi yang dilakukan bertahun-tahun kemudian menyebutkan bahwa hingga sepertiga penduduk telah tewas.

Di banyak tempat, seluruh desa diobrak-abrik, penghuninya dipaksa meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat-tempat penampungan yang dijaga ketat.

Tak lama setelah invasi itu, pada bulan Oktober 1975, lima wartawan dari Australia, Inggris, dan Selandia Baru tewas tertembak oleh pasukan Indonesia di Balibo, dekat perbatasan antara Timor Timur dan Timor Barat. Mereka bermaksud membuat laporan mengenai kegiatan militer Indonesia ketika laporan tentang invasi yang direncanakan terhadap Timor Timur banyak beredar di media. Petugas yang bertanggung jawab atas pembunuhan Balibo, Kapten Yunus

Yosfiah, tak pernah dituntut. Menyusul pensiunnya ia dari angkatan darat, ia menjabat sebagai menteri penerangan Indonesia. Ia kini tengah menyelesaikan masa jabatannya yang kedua sebagai anggota DPR, parlemen nasional Indonesia.

Sebagai hasil upaya mantan penjajah kolonial, Portugis, pendudukan ilegal atas Timor Leste tetap berada dalam agenda PBB, sehingga tragedi itu tetap melekat dalam ingatan komunitas internasional.

Ketika B.J. Habibie, wakil presiden Suharto, mengambil alih kekuasaan setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998, ia berada dalam tekanan untuk mereformasi sebagian pembatasan politik yang paling menyakitkan yang diberlakukan selama jaman Orde Baru Suharto. Khususnya, kampanye di seluruh dunia yang menentang pendudukan atas Timor Leste telah sangat merusak reputasi Indonesia. Ketika delegasi resmi Indonesia berada di luar negeri untuk menghadiri pertemuan internasional atau peristiwa kenegaraan, ada saja demonstrasi yang mengutuk Indonesia dan menyerukan diakhirinya pendudukan itu.

Pada bulan Januari 1999, dengan keinginan untuk menjauhkan negara ini dari apa yang telah menjadi rasa malu diplomatik yang serius, Habibie memutuskan untuk memberi warga Timor 'konsultasi populer' dan menawarkan 'opsi' untuk memberikan suara menyetujui atau menolak 'otonomi'. Keputusan ini membuat angkatan bersenjata marah besar dan menimbulkan gerakan kampanye pembunuhan dan penculikan atas siapa saja yang dicurigai pro-kemerdekaan, yang terus berlanjut sepanjang tahun. Ketika referendum diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab atas keamanan sesuai

dengan ketentuan kesepakatan yang dicapai bersama PBB.

Meskipun ketakutan mencekam di jalanan, warga Timor muncul dalam jumlah besar pada tanggal 30 Agustus untuk memberikan suara dengan hasil 78,5 persen menentang otonomi dan 21,5 persen menyetujuinya. Setelah hasil diumumkan pada tanggal 4 September, pasukan di bawah komando Jenderal Wiranto membalas dendam terhadap warga Timor. Infrastruktur negara itu hampir semuanya dihancurkan. Sekitar 1.500 warga Timor dibunuh dan 200.000 orang dibawa menyeberang ke Timor Barat dengan paksa di bawah acungan senjata.

Pada bulan Februari 2003, Deputi Penuntut Umum untuk Tindak Kejahatan Berat pada Pengadilan Negeri Dili, yang bertindak dengan wewenang UNMISSET, Misi PBB bagi Dukungan atas Timor Timur, telah mengeluarkan surat dakwaan, menetapkan Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima Tentara Nasional Indonesia, bersama enam jenderal Indonesia lainnya, sebagai tersangka kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Surat dakwaan yang ditujukan kepada Jenderal Wiranto menyatakan bahwa:

'Selama tahun 1998 dan 1999, WIRANTO sering melakukan kunjungan ke Timor Timur di mana ia bertemu dengan tokoh masyarakat Timor Timur, anggota media dan pejabat yang mewakili masyarakat internasional, termasuk Petugas Liaison Militer serta pejabat Misi PBB di Timor Timur [UNAMET]' (ketika ia) 'berkali-kali diberitahu mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI [Tentara Nasional Indonesia].'

'Selama tahun 1999, WIRANTO gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan yang masuk akal untuk

mencegah kejahatan yang tengah dilakukan bawahannya dan ia gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan yang masuk akal untuk menghukum pelaku kejahatan itu.'

'Oleh karena alasan tersebut di atas, WIRANTO secara kriminal bertanggung jawab atas tindakan bawahannya menurut bagian 18 / Peraturan UNTAET 2000/15.'

Semua usaha untuk mengekstradisi Wiranto ke Timor Leste gagal. Indonesia telah mengemukakan dengan jelas dalam sejumlah kesempatan bahwa ia tak akan bermaksud mengekstradisi warga negara Indonesia untuk menghadapi proses kriminal atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Setelah pensiun dari angkatan darat, Jenderal Wiranto memasuki dunia politik dan maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden tahun 2004. Pada tahun 2009 ia berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kala untuk merebut kursi sebagai wakil presiden.

Calon wakil presiden lainnya dalam tahun 2009 adalah Prabowo, juga pensiunan jenderal dan mantan menantu Suharto, yang menjadi pasangan Megawati Sukarnoputri, yang merupakan mantan presiden Indonesia, dalam perebutan kursi pada pemilihan presiden tahun ini. Prabowo mengadakan perjalanan tugas selama beberapa kali ke Timor Timur. Ia paling dikenal karena keterlibatannya dalam penculikan dan hilangnya puluhan mahasiswa pro-demokrasi beberapa bulan sebelum jatuhnya Suharto.

Pimpinan milisi tertuntut diserahkan kembali ke Indonesia

Kasus impunitas paling baru terjadi pada bulan Agustus 2009 ketika Martenus Bere, mantan pimpinan milisi diserahkan ke kedutaan besar Indonesia di Dili, setelah ditangkap di Timor Leste ketika

tengah berkunjung ke Dili, setelah menyeberang dari Timor Barat.

Bere telah dituntut oleh Unit Kejahatan Berat yang didukung PBB karena kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan puluhan warga Timor, termasuk tiga pendeta, sepuluh tahun yang lalu di Suai. Ia juga didakwa membantu pemerkosaan dan penculikan Alola, seorang perempuan muda Timor, yang kemudian namanya dipakai untuk lembaga sosial yang didirikan oleh Kirsty Sword-Gusmao, istri Xanana Gusmao, Perdana Menteri Timor-Leste.

Dilepaskannya Bere membuat banyak warga Timor marah. Terdapat seruan keras menentang pelepasannya dalam kongres korban yang diadakan di Dili pada bulan September tahun ini. Seorang juru bicara PBB juga mengutuk dilepaskannya Bere sambil menekankan bahwa hal ini merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan dan perundang-undangan di Timor Leste. Menurut pernyataan departemen luar negeri Indonesia yang dikeluarkan menyusul gelombang kemarahan terkait dengan Bere, 'Indonesia masih menolak untuk bahkan memikirkan extradisi bagi warga negaranya untuk menghadapi tuntutan kriminal terkait dengan suatu hal (mis, pembunuhan masal di Timor) yang sudah diselesaikan.'

Menanggapi seruan yang menentang dilepaskannya Bere, Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, mengatakan: 'Mengembalikan hubungan baik dengan Indonesia lebih penting daripada keadilan penuntutan.' Hal ini jelas tak mewakili perasaan sebagian besar masyarakat Timor.

Dalam pidato yang disampaikan pada ulang tahun kesepuluh referendum 1999, Presiden Ramos-Horta menyatakan: 'Tak akan ada Pengadilan Internasional.' Ia menggambarkan Unit Kejahatan Berat

sebagai penghamburan uang dan berkata bahwa itu harus dibubarkan karena tak ada lagi kasus untuk ditangani. Tetapi pejabat PBB berkata bahwa terdapat lebih dari 300 kasus yang masih menunggu dari 398 kasus yang teridentifikasi pada tahun 1999. Saran bahwa Pengadilan Internasional tak diperlukan lagi merupakan pelanggaran Konstitusi Timor Leste yang berbunyi sbb:

Bagian 160 (Kejahatan Berat)

'Tindakan yang dilakukan antara tanggal 25 April 1974 dan 31 Desember 1999 yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan bangsa atau kejahatan perang harus dapat dikenai proses kriminal di pengadilan nasional atau internasional.'

Bagian 163, Paragraf 1 (organisasi judisial transisional)

'Hal judisial kolektif yang ada di Timor Timur, terintegrasi oleh hakim nasional dan internasional dengan kompetensi untuk menghakimi kejahatan berat yang dilakukan antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999, harus tetap ada untuk waktu yang dianggap sangat penting guna menyelesaikan kasus-kasus yang masih dalam investigasi.'

Kesimpulan

Pada bulan September 2002, salah seorang aktivis HAM terkemuka di Indonesia, Munir Said Thalib menyampaikan makalah berjudul, *Strategi Masyarakat Madani Indonesia untuk Mengakhiri Impunitas*. Ia mengatakan: 'Impunitas adalah cerminan sistem kekuasaan di mana ia berada. Penghapusan impunitas dapat digunakan sebagai langkah maju menuju demokrasi.' Ia juga mengatakan: 'Usaha untuk melawan impunitas berarti menghilangkan baju baja dari sistem kekuasaan absolut.'

Pada tanggal 7 September 2004, Munir dibunuh dalam penerbangan dari Jakarta

ke Amsterdam. Lima tahun sejak kematiannya, otak pembunuhan masih belum dibawa ke pengadilan. Pada tahun 2007, orang yang mengaku membuat racun yang membunuh Munir dihukum 20 tahun penjara. Pada tahun 2008, 2008, Muchdi Purwoprandjono, yang pada saat Munir tewas menjabat sebagai wakil ketua Badan Inteligen Negara, badan yang banyak diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan itu, dibebaskan setelah beberapa saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah bagi penuntutan itu menarik kesaksian mereka secara berturut-turut dan dalam keadaan yang mencurigakan, sehingga melemahkan kasus penuntutan.

Sebagai refleksi sistem kekuasaan di mana ia berada, kedalaman impunitas di Indonesia kebanyakan disebabkan oleh pengaruh yang berlanjut dari militer dalam lembaga politik Indonesia dan penghormatan yang dirasakan atas perwira militer terlepas dari diketahuinya keterlibatan mereka dalam kejahatan berat di Timor Leste, Papua Barat dan Aceh, bahkan tuntutan resmi yang diajukan kepada mereka untuk kejahatan itu. Fakta bahwa setiap pasangan yang bertarung dalam pemilihan presiden yang berlangsung sebelumnya di tahun ini terdiri dari satu jenderal angkatan darat - Susilo Bambang Yudhoyono yang maju bersama Budiono, pemenang pemilu, Megawati Sukarnoputri yang didampingi oleh pensiunan jenderal Prabowo, dan Jusuf Kalla yang maju bersama pensiunan jenderal, Wiranto - mengindikasikan bahwa perwira senior militer masih menikmati pengakuan sebagai aktor sah dalam kancah politik.

Meskipun Indonesia dalam hari-hari ini seringkali dipuji sebagai negara dengan semangat demokrasi yang tinggi, tetapi masih saja ternoda oleh impunitas yang dinikmati oleh perwira militer senior. Masyarakat madani di Indonesia masih harus menempuh jalan yang panjang

sebelum perwira militer dengan darah di tangannya diseret ke meja hijau. Selama militer masih terus berpengaruh dan dianggap sebagai orang tanpa noda dalam reputasi mereka, peluang untuk mengakhiri momok impunitas sangatlah kecil.

September 2009

Ini adalah versi panjang dari presentasi oleh pengarang dalam suatu konferensi di Dili, Timor Leste pada bulan Agustus 2009 dengan tema: *Strengthening Solidarity: The Struggle for Justice Continues* (Penguatan Solidaritas: Perjuangan bagi Keadilan Berlanjut).